MODUL NUSANTARA

INTEGRASI DAN PEMBAURAN KEBANGSAAN

Drs. Syamsu Ridhuan, M. Pd

PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
PERTUKARAN MAHASISWA MERDEKA
UNIVERSITAS ESA UNGGUL
TAHUN 2021

PENDAHULUAN

A. Diskripsi

Materi pembelajaran pengetahuan integrasi dan pembauran kebangsaan, merupakan serangkaian informasi tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dan terintegrasinya wilayah kepulauan nusantara yang terbentang dari Sabang sampai Merauke di bawah wadah NKRI. Menyadari bahwa bangsa Indonesia terdiri dari beragama suku bangsa asli (etnis) yang telah mendiami wilayah nusantara, yaitu sejak keberadaan wilayah ini. Pelan tapi pasti telah terjadi asimilasi secara biologis dan sosial budaya dengan para pendatang yang berasal dari luar wilayah kepulauan nusantara. Peristiwa asimilasi itu telah terjadi, mulai dari zaman penjajahan, perjuangan kemerdekaan, awal kemerdekaan (orde lama), orde baru, hingga era reformasi sekarang ini. Begitu pula terhadap pembauran kebangsaan akan terus terjadi sepanjang masa.

Bicara tentang integrasi dan pembauran kebangsaan, tidaklah sulit, gampang dan enak seperti suatu komoditi yang laris-manis bila dijual. Sering dibaca pada literatur atau mata pelajaran dan media-media cetak, elektornik dan digital; didengar dari paparan pembelajaran para guru, dosen dan pendidik; tausiah dari para tokoh agama dan lintas agama; nasehat dari para tokoh masyarakat dan tohoh adat; pidato-pidato kepala daerah, anggota legislatif (MPR RI, DPR RI, DPRD, DPD RI), hingga presiden kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan informasi tentang integrasi dan pembauran kebangsaan.

Namun yang menjadi permasalahan adalah bagaimana bagi seluruh warga negara, bangsa Indonesia dapat melaksanakan integrasi dan pembauran kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari secara nyata, cerdas, efektif, dan efisien sesuai dengan amanat undang-undang. Keharusan menjaga keutuhan, persatuan dan kesatuan bangsa, serta harmoni dalam pembauran kebangsaan, terutama dalam menjamin tetap tegaknya NKRI, adalah suatu komentmen bagi setiap wargan negara terhadap negara dimanapun keberadaanya. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa para penjuang kemerdekaan, dan apresiasi kepada *punding father,* pendiri dan proklamator NKRI. Rasa bangga harus dipatri dalam hati sanubari setiap warga negara Indonesia. Hal ini adalah sebagai pengenjawatah dari rasa syukur eksistensi keutuhan integrasi wilayah dan suku bangsa

Indonesia, serta haromonisasi pembauran suku bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Tujuan

Kegiatan pembelajaran integrasi dan pembauran kebangsaan secara umum bertujuan untuk membrikan pemahaman pengetahuan, menguatkan tekad, sikap dan perbuatan untuk menjaga keutuhan, harmonisasi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia ditengah-tengah banyaknya tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan di era globalisasi, revolusi komunikasi dan informasi (4.0), sehingga NKRI tetap jaya (*survival*).

Tujuan khusus, setelah mengikuti pembelajaran (teori dan praktik), mahasiswa dapat :

1. Menjelaskan pengetian integrasi dan pembauran kebangsaan secara konsepsional, teoritis dan praktis dalam rangka memantapkan tekad, sikap dan perbuatan menjaga keutuhan, harmonisasi, persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.
2. Mentransfomrasikan pemahaman tentang substansi integrasi dan pembauran kebangsaan sebagai suatu strategi dalam menjaga keutuhan NKRI dari tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan di era globalisasi, revolusi komunikasi dan informasi (4.0)
3. Memperkuat semangat nasionalisme dalam bentuk menjamin tetap kuatnya integrasi wilayah, persatuan dan kesatuan bangsa dalam keberagaman suku bangsa dan hormonisasi dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbagsa dan bernegara.

C. Pretest

Pretest ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap pengetahuan keanekaagaman dan kebinekaan nusantara sebelum mengikuti perkuliahan dan mempelajari modul.

Harap dipilih satu jawaban yang tepat dan benar.

1. Integrasi nasional terdiri dari 2 (dua) kata. “Integrasi” berasal dari bahasa Inggris *integration* artinya pembauran. Pembauran dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang utuh. Kata “Nasional” berasal dari bahasa Inggris *nation* artinya bangsa, rakyat, atau negara. Maka secara etimologi integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam

persatuan dan kesatuan yang utuh. Pengertian ini sangat cocok untuk menyebut integrasi nasional Indonesia. Dimana negara Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa, budaya, sistem sosial, norma dan adat-istiadat.

a. Sehingga tidak perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya
b. Sehingga perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya
c. Sehingga perlu ada pembauran yang menyatu dengan menghilangkan ciri khas keberagamannya
d. Semua jawaban benar

   Kunci jawaban B

2. Integrasi wilayah nusantara, merupakan perwujudan dari satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah nusantara, Indonesia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh 2 (dua) benua, Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara 2 (dua) samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Jumlah pulaunya lebih kurang 17.504 pulau. Sebagai konsekwensi logis, negara Indonesia harus mampu menjaga keutuhan wilayah nusantara. Tidak boleh satu jengkalpun wilayah nusantara diambil secara paksa oleh negara lain maupun dijual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan air adalah milik negara, dalam hal ini negara Indonesia. Oleh sebab itu, integrasi wilayah sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dari segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dapat…..

a. membahayakan indentitas nasional
b. membahayakan integrasi nasional
c. membahayakan intervensi internasional
d. semua benar

   Kunci jawaban B

3. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia sudah memiliki wawasan, cara pandang dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai sistem nilai keberadaban, kemartabatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila juga

sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan sumber hukum tidak boleh harus ditiadakan. Misalnya: organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, gerakan-gerakan saparatis, makar dan anarkis bertentangan dengan Pancasila. Sehingga apapun aktivitas, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat berpotensi membuat perpecahan bangsa dan negara dilarang keberadaannya di NKRI. Pernyataan di atas masuk dalam kategori inegrasi…….

a. politik

b. sosial budya

c. ideologi

d. pertahanan keamanan

Kunci jawaban C

4. Fungsi pemerintahan dalam bidang pertahanan dan keamanan mutlak diperlukan dalam menjalankan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi pertahanan memberikan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap merdeka, berdulat, dan bermartabat. Sedangkan fungsi keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kedua fungsi pemerintahan ini harus bersinergi dan berintegrasi agar tercipta suasana yang aman, tenteram, kondusif, demokratis, dinamis dan harmonis. Itu sebabnya dalam konteks bela negara, fungsi pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri) merupakan unsur utama. Tterkait dengan hak dan kewajiban warga negara, maka dalam pembelaan terhadap negara, mayarakat termasuk sebagai ……

a. unsur wajib

b. unsur pendukung

c. unsur inti

d. unsur pembela

Kunci jawaban B

5. Kondisi integrasi nasional selalu mengalami pasang-surut dan dinamis mengikuti perkembangan tingkat ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Makin tangguh tingkat ketahanan nasional, makin kuat pula ikatan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan nasional memberikan kontribusi

yang signifikan terhadap kuatnya ikatan integrasi nasional. Hipotesis ini diambil dari berbagai informasi tentang implementasi ketahanan nasional yang mencakup pancagatra dan trigatra (astagatra). Akronim Pancagatra lazim disebut……..…..

a. ipoleksosbudhankam
b. ipoleksosbudkamsa
c. sikayamampu
d. ipolekbudhankam

Kunci jawaban A

URAIAN MATERI

A. Pengertian Integrasi Nasional dan Pembauran Kebangsaan

1. Integrasi

Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris *integration*, yang mempunyai arti penggabungan; penyatuan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Bila kata integrasi ditambah dengan kata bangsa, menjadi integrasi bangsa maka memilik arti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan suatu identitas nasional. Sedangka kata nasional, berarti memiliki sifat kebangsaan, bersifat kebangsaan; berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri; meliputi suatu bangsa. (Ebta. 2012). Dengan demikian, maka integrasi nasional merupakan penyatuan suku bangsa-suku bangsa yang memiliki sifat kebagsaan yang satu, dan penyatuan wilayah-wilayah yang didiami oleh suku bangsa-suku bangsa ke dalam lingkup yang lebih besar, negara.

Secara teoritis, Paul B. Horton dan Chester L. Hunt (2006) menyeburkan integrasi sebagai proses pembangunan masyarakat yang mana segenap kelompok ras dan etnik mampu berperan secara bersama-sama dalam kehidupan budaya dan ekonomi. Sedangkan integrasi nasional menurut Saafaroedin Bahar (1996, dalam Ristek Dikti. 2016) menyatkan bahwa integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya.

Menurut Riza Noer Arfani (2001), integrasi nasional merupakan pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan beberapa kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Djuliati Suroyo (2002) menyebut integrasi nasional sebagai bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Sedangkan Ramlan Subekti (2010) mengungkapkan, integrasi bangsa sebagai suatu proses penyatuan beberapa kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam satu identitas nasional.

Integrasi nasional mencakup kesediaan untuk membaur dan beradaptasi dalam segala perbedaan. Hasil penelitian Syamsu (2018) tentang *national integrity* atau pembauran bangsa mengungkap bahwa pembauran bangsa atau integrasi nasional

dalam perspektif beda suku bangsa dan beda agama justru memberikan kekuatan persatuan dari dua etnis berbeda.

2. Pembauran Kebangsaan

Pembauran kebangsaan terdiri dari dua kata, yaitu pembauran dan kebangsaan. Pembauran artinya sama dengan percampuran atau pencampuran. (Purwadarminta. 2008). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pembauran merupakan proses, cara, perbuatan membauran, pencampuran; Peniadaan sifat-sifat eksklusif kelompok etnik di dalam masyarakat dalam usaha mencapai kesatuan bangsa; Perkawinan campuran antara warga negara asli (pribumi) dan warga negara keturunan asing. (Ebta, 2012). Pencampuran mengandung makna bahwa ada banyak unsur minimal lebih dari satu unsur menjadi berbaur atau bersatu tanpa ada skat sebagai dinding pemisah, meskipun sesungguhnya terdapat perbedaan dari setiap unsur didalamnya. Ilustrasi ini dapat dianalog dengan bersatunya beragam suku bangsa atau etnis yang berada di wilayah nusantara, menjadi satu kesatuan yang utuh atau terjadi integrasi yang kuat.

Kata kebangsaan berasal dari kata bangsa adalah (1) Kumpulan manusia yang terikat oleh kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi, (2) orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta ber-pemerintahan sendiri. Secara sosiologis bangsa termasuk kelompok paguyuban yang secara kondrati ditakdirkan untuk hidup bersama dan senasib sepenang-gungan di dalam suatu negara.

Dalam konteks sosial, pembauran bangsa pada hakikatnya adalah peniadaan sifat-sifat eksklusif kelompok etnik di dalam masyarakat sebagai usaha mencapai kesatuan bangsa (FPK DKI Jakarta, 2017 : 2). Pembauran kebangsaan mempunyai makna yang lebih luas dari pada asimilasi, karena membaur tidak mengandung konotasi menghilangkan ciri-ciri etnis. Membaur lebih kearah mengasosiasi diri dengan masyarakat luas dan “menga-winkan” dirinya dengan masyarakat luas dalam hal ini adalah bangsa.

Pembauran, yang dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang utuh. Nasional dari bahasa Inggris, *nation*, artinya bangsa, rakyat, negara. Maka secara etimologi integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Pengertian ini sangat cocok untuk menyebut integrasi nasional Indonesia. Negara Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa, beragam budaya, ada banyak perbedaan

dalam sistem sosial, norma dan adat-istiadat. Oleh sebab itu, perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya.

B. Bentuk-Bentuk Integtasi Nasional

Dalam implemetasi konsepsi wawasan nusantara, intergrasi nasional merupakan perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah nusantara, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan.

1. Integrasi Wilayah Nusantara

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan (*archipelago state*), yang berarti penintegrasian seluruh gugusan pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang berada di ruang (*space*) wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Indonesia. Bukan negara pulau (*islan state*), sebab negara pulau hanya terdiri satu pulau besar yang dikelilingi oleh perarian (laut). Sedangkan negara kepulauan, jumlah pulaunya banyak berserak tersebar dalam satu wilayah negara, dihubungkan oleh perairan (laut). Jadi secara jelas, bahwa negara kepulauan diintegrasikan, dihubungkan dan disatukan oleh perairan (laut).

Integrasi wilayah nusantara, merupakan perwujudan satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah nusantara. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh 2 (dua) benua. Benua Asia dan benua Australia, serta berada diantara 2 (dua) samudra. Samudra Pasifik dan samudra India. Jumlah pulaunya sebanyak 17.504 pulau (BPS. 2010). Sebagai konsekwensi logis, negara Indonesia harus mampu menjaga kutuhan wilayah nusantara. Tidak boleh satu jengkalpun wilayah nusantara diambil secara paksa oleh negara lain maupun dijual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bumi dan air adalah milik negara, dalam hal ini negara Indonesia.

Berkaitan dengan hal itu, maka keutuhan wilayah merupakan harga mati. Moto ini lazim didengar sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harga mati! Tidak boleh ada pemisahan wilayah dengan modus refrendum untuk merdeka, atau dengan paksaan melalui serangkaian gerakan sparatis yang pada akhirnya membentuk negara merdeka. Gerakan sparatis, salah satu bentuk makar yang bertujuan untuk memecah belah wilayah Indonesia dan membentuk negara sendiri yang berdaulat. Bebarapa gerakan sparatis diantaranya : Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Gerakan Republik Maluku Selatan (RMS), dan Gerakan Papua Barat Merdeka. Gerakan-gerakan sparatis ini bertentangan dengan hakekat integrasi nasional, dan secara yuridis formal

melanggar Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945. Maka dari itu, keberadaannya tidak dibenarkan dan dilarang.

Dalam rangka menjaga keutuhan integrasi wilayah nusantara, maka pemekaran wilayah otonom sangat diperlukan. Sekaligus sebagai suatu solusi untuk meminimalisir dan menangkal keberadaan gerakan makar dan sparatis untuk yang bertujuan membentuk negara. Pemekaran wilayah otonom menjadi suatu kebutuhan penting bagi negara kepulauan. Sebab akan dapat (1) meperpendek rentang kendali pembangun wilayah, (2) melakukan pendistribusian sebagai tugas-tugas pemerintah kepada daerah, dan (3) pada akhirnya dapat mempercepat kemajuan daerah. Jadi sangat jelas perbedaan antar makar dan mekar. **Makar** untuk keperluan kelompok sparatis membentuk wilayah merdeka terpisah dengan NKRI, sedagkan **Mekar** atau pemekaran untuk keperluan pembangunan bangsa yang berkontribusi sangat kuat dalam memperkuat itegrasi nasional.

2. Integrasi Ideologi

Pancasila adalah Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. Sebagai ideologi, jelas Pancasila dipadang mampu mewujudkan integrasi bangsa dan negara Indonesia. Anjuran integrasi terlihat pada semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Pada bangsa yang sangat pluralis, ideologi Pancasila mendapatkan tempat yang paling utama dalam mewujudkan persatuan dan keatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa merupakan doktrin nasionalisme yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh bangsa Indonesia.

Ideologi Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia memiliki wawasan, cara pandang dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Karena Pancasila mempunyai sistem nilai keberadaban, kemartabatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, diketahui juga bahwa Pancasila sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumnber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan sumber hukum, tidak boleh berada di Indonesia. Misalkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, gerakan-gerakan sparatis, makar dan anarkis bertentangan dengan Pancasila. Sehingga apapun aktivitas, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila, yang efeknya dapat membuat perpecehan bangsa dan negara dilarang keberdaannya di NKRI.

3. Integrasi Politik

Secara etimologi politik berasal dari bahasa Yunani, ***politeia***, terdiri dari 2 (dua) suku kata. ***Polis*** artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri, yaitu negara. ***Teia***, berarti urusan. Jadi politik adalah kesatuan masyarakat yang mengurus negara. Secara terminologi, politik berasal dari bahasa Inggris : *politic* dan *policy*. Politic mempunyai arti sebagai serangkaian asas, prinsip, keadaan, cara dan alat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Sedangkan *policy*, kebijakan yang diambil oleh pengambil keputusan (negara) untuk kepentingan masyarakat agar menjadi lebih baik dari pada sebelumnya.

Implementasi politik dapat berupa urusan ketatanegaraan, sistem pemerintahan, berbagai aktivitas pencapaian tujuan, tindakan menyangkut siasat dan kebijaksanaan negara dan/atau pemerintah untuk kepentingan masyarakat dalam menyelesaikan masalah. Menurut Miriam Budiarjo (2008) politik merupakan bermacam-macam kegiatan yang mengyangkut penentuan tujuan dan pelaksnaan tujuan tersebut. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan masyarakat dan bukan tujuan pribadi seseorang. Selain itu, politik juga menyangkut kegiatan berbagai kelompok, termasuk partai politik dan kegiatan perorangan.

Integrasi politik mempunyai makna sebagai kesatuan politik untuk pembangunan bangsa dan mencapai tujuan nasional. Aktivitas, cara, bentuk, gaya dan strategi politik berbeda-beda. Politik dalam bentuk ativitas, merupakan segala bentuk kegiatan mulai dari perorangan, kelompok, organisasi, partai, pemerintah dan negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Setiap pelaksanaan aktivitas dipastikan selalu menggukan cara, gaya, strategi dan bentuk yang ditentukan oleh pelaku politik. Keanekaragaman cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik merupakan refleksi dari kehidupan yang demokratis. Akan tetetapi perlu diingat bahwa dasar dan asas aktivitas harus ada jaminan sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar hukum yang mengikat. Dalam pengertian yang mengintegrasikan aneka ragam cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik, harus menjadi satu kesatuan yang utuh-menyeluruh dalam mencapai tujuan nasional Indonesia.

Contoh integrasi politik, melalui aktivitas partai politik di Indonesia. Pada Pemilu 2014, dari sebanyak 24 Partai Politik yang mendaftar, ternyata hanya 10 Partai Politik yang dinyatakan lulus verifikasi dan berhak ikut Pemilu. Begitu juga untuk Pemilu

2019 Komisi Pemilihan Umum Indonesia (KPU) telah melakukan verifikasi 27 Partai Politik yang mendaftar dan memastikan hanya sebanyak 14 Partai Politik yang dinyatakan lulus bisa ikut Pemilu tahun 2019 (KPU. 2017). Bila diamati cara, gaya, strategi dan bentuk aktivitas politik dari Partai Poltik-Partai Politik yang ikut Pemilihan Umum, jelas-jelsa berbeda-beda antara satu Partai Poltik dengan Partai Poltik yang lainnya. Perbedaan-perbedan itu adalah sah dan wajar, sebab menyangkut hak asasi Partai PolItik. Tujuan jangka pendek adalah bangaimana memenangkan pemilu dengan sebanyak-banyaknya menempatkan wakil partai menjadi wakli rakyat di lembaga legislatif pusat dan daerah. Tujuan jangka panjang, sama dengan partai poltik-partai poltik yang lain yaitu untuk mensuksekan pencapaian tujuan nasional Indonesia sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Integrasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi nasional pada prinsipnya merupakan serangkaian proses integrasi dari beberapa bentuk, prinsip, cara, model dan strategi ekonomi yang ada di bawahnya. Indonesia memiliki bentuk pembangunan ekonomi masyarakat dengan model pemberdayaan koperasi. Koperasi sebagai soko guru perekonomian di Indonesia, tidak dapat berkembang dengan baik. Pengaruh sistem perekonomian neo liberal, etatisme dan konglemerasi pemodal kuat mengakibatkan model ekonomi koperasi tinggelam dalam ketidak berdayaan. Sangat disayangkan, ekonomi koperasi sebagai ciri kahs ekonomi ke-Indonesia-an dipandang hanya sebagai pelengkap dari salah satu integrasi nasional dalam bidang ekonomi.

Semangat integrasi ekonomi yang bercirikan ke-Indonesia-an, memang masih tetap ada. Namun kenyataan koperasi memiliki kelemahan-kelemahan yang harus diatasi. Kelemahan pengelolaan koperasi menyangkut 3 (tiga) hal, yaitu permodalan, manajemen dan konsinyasi. Sedangkan fakta ekonomi pasar yang neo liberalis saat ini berekembang pesat, sebab sistem ekonomi neo liberalis ini memiliki keunggulan ketiga-tiganya yang justru menjadi kelemahan dari sistem ekonomi koperasi. Belum lagi adanya pasar bebas yang telah berlangsung dewasa ini, memerulan daya saing yang tingi dan perlu kompetisi yang tangguh. Sehingga model-model sistem perekomian tradisional sampai pada sistem ekonomi koperasi, akan makin jauh

tertinggal jika tidak mampu berkompetisi dan beradaptasi dengan performa dan kualitas yang tinggi.

Dalam kaitan dengan aktivitas ekonomi nasional agar dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, maka konsep integrai ekonomi menurut Kemristek-Dikti (2016 : 61) integrasi ekonomi berari terjadi saling ketergantungan antara daerah dalam memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan, menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerja sama yang saling menguntungkan dan sinergis. Di sisi lain, integrasi ekonomi adalah penghapusan (pencabutan) hambatan-hambatan antar daerah yang memingkinkan ketidak lancaran hubungan antar keduanya, misalnya peraturan, norma, prosedur dan pembuatan aturan bersama yang mampu menciptakan keterpaduan dalam bidang ekonomi.

Dalam skala nasional integrasi ekonomi perlu ada payung hukum yang mengatur, melindungi dan memperkuat perekonomian daerah yang sudah terhubung. Baik antar daerah, maupun daerah dan pusat supaya mampu bersaing dan berkompetisi dalam menghadapi pasar bebas dan dapat meningkatkan perekonomian nasional.

5. Integrasi Sosial Budaya

Indonesia terkenal dengan bangsa yang plural, majemuk dan beraneka ragam suku bangsa, bahsa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, sistem sosial. Jumlah suku bangsa di Indonesia sebanyak 1.340 suku bangsa atau etnis (BPS. 2010) ditambah warga keturunan Tionghoa, India, Arab dan Kaukasia yang sudah bertahun-tahun, beranak-cucu menjadi warga negara Indonesia. Membuat keanekaragaman makin bertambah banyak, tentu masing-masing mempunyai ikatan emosional dan primordial terhadap sesama etnisnya. Begitu pula bahasa daerah/lokal menurut data BPS (2010) tercatat sebanyak 1.211 bahasa daerah/lokal, ditambah bahasa asing asal warga keturunan menjadi semakin bertambah banyak bahasa lokal yang dipergunakan dalam percakapan sehari-hari dalam lingkup keluarga atau etnis yang sama.

Integrasi sosial budaya pada intinya adalah kemampuan setiap etnis beradaptasi, menerima dan bertoleransi atas eksistensi keaneka-ragaman suku bangsa, bahsa daerah/ bahsa lokal, adat-istiadat, norma, kebiasaan, sistem sosial-budaya yang berada di dalam lingkup wilayah nusantara, Indonesia menjadi suatu kebersamaan yang kuat dan utuh. Membangun kesetiaan baru dan semangat baru. Kesetiaan baru adalah kesetiaan terhadap tanah-air Indonesia, semangat baru adalah semangat kebangsaan,

nasionalisme Indonesia. Sebagai pengikatnya adalah kemeredekaan dan kedaulatan negara yang sudah diproklamsikan tanggal 17 Agustus 1945. Tidak ada yang boleh melakukan tindakan pecah-belah terhadap bangsa dan negara Idonesia. Maka integrasi nasional merupakan pilihan yang amat bagus untuk mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penulis menutur-kata "biarkanlah unsur-unsur sosial budaya bangsa ini mewarnai integrasi nasional, karena sesungguhnya kebersamaan dalam perbedaan adalah rahmat Tuhan YME, makin menikmati akan makin indah adanya". Dengan demikian, tidak ada yang perlu diragukan atas kehadiran sosial budaya, bagi kuatnya integrasi sosial budaya. Justru yang harus diwasadai dan antisipasi pengaruh negatifnya adalah masuk-masuknya unsur-unsur sosial budaya luar ke Indonesia. Infiltrasi soaial dan hegomony kebudayaan telah membedntuk penjajahan baru bidang sosial budaya pada negara-negara baru, tidak terkecuali Indonesia. Makin kuat integrasi sosial budaya bangsa, akan makin kuat integrasi sosial budaya nasional. Sehingga pengaruh negatif unsur-unsur sosial budaya asing dapat diatasi dan ditolak agar tidak menggerus dan melunturkan integrasi sosial budaya nasional Indonesia.

6. Integrasi Pertahanan Keamanan

Fungsi pemerintahan bidang pertahanan dan keamanan, mutlak diperlukan dalam menjalankan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi pertahanan memberikan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap merdeka, berdulat, dan bermartabat. Sedangkan fungsi keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kedua fungsi pemerintahan ini harus bersinergi dan terintegrasi agar tercipta suasana yang aman, tentram, konusif, demokratis, dinamis dan harmonis. Itu sebabnya dalam konteks bela negara, maka fungsi pertahanan dan keamanan : TNI dan Polri merupakan unsur utama sedangkan mayarakat sebagai unsur pendukung terkait dengan hak dan kewajiban setiap warga negara dalam pembelaan terhadap negara.

Dalam membangun partisipasi aktif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, muncul insiatif orang-perorangan kelompok-kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, intitusi kemasyarakat, lembaga swadaya masyarakat, dan lain sebaginya membentuk kesatuan-kesatuan, gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil

(hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain yang berasal dari unsur masyarakat sipil, dengan semangat bela negara memberikan bantuan untuk tugas pengamanan dan ketertiban masyarakat. Gagasan dan niat yang terkandung dan tersirat di dalamnya secara filosofis bagus, namun dalam implemtasi bila tidak hati-hati dan kurang pengawasan dari apratur dan masyarakat, sering berlangsung tidak sesuai dengan tujuan untuk keamanan, kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Sering melawan hukum dan peraturan perundang-undangan sebagai landasan yuridis formalnya. Sehingga perlu dievaluasi dan dikembalikan pada fungsinya agar partisipasi dalam bidang pertahanan dan keamanan benar-benar terpenuhi.

Integrasi pertahanan dan keamanan pada hakekatnya adalah terlaksananya hak dan kewajiban warga negara dalam pembelaan negara. Salah satu bentuk refleksi bela negara adalah kewajiban bela negara adalah dengan memberikan rasa aman, tentran, tertib dan kondusif ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, seluruh warga negara, baik secara orang-perorangan, kelompok-kelompok tertentu, organisasi sosial-politik, intitusi kemasyarakat, lembaga swadaya masyarakat, kesatuan-kesatuan kemanan (Banser), gugus-gugus keamanan, pertahanan sipil (hansip), perlawanan rakyat (wanra), satuan pengamanan (Satpam), dan lain-lain, dalam melaksanakan kewajiban bela negara menjaga negara dari segala bentuk ancaman dari dalam maupun luar negeri, menjaga ketertiban, kenyamanan dan keamanan harus bersinergi dan terintegrasi dalam satu komando. Untuk bidang pertahanan dibawah komando Tentara Nasional Indonesia (TNI), sedangka bidang keamanan dan ketertiban di bawah komando Polisi Republik Indonesia (Polri).

C. Faktor-Faktor Integtasi dan Disintegrasi Nasional

Kondisi integrasi nasional selalu mengalami pasang-surut dan dinamis mengikuti perkembangan tingkat ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Makin tangguh tingkat ketahanan nasional, makin kuat pula ikatan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kuatnya ikatan integrasi nasional. Hipotesis ini diambil dari berbagai informasi tentang implemntasi ketahanan nasional yang mencakup pacagatra dan trigatra (astagatra). Pancagatra meliputi ketahanan nasional mencakup aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan

(IPOLEKSOSBUDHANKAN). Sedangkan trigatra mencakup : (1) posisi dan letak geografi Indonesia, (2) aspek keadaan dan kekayaan alam, dan (3) keadaan dan kemampuan penduduk.

Gambar. Pembauran Dalam Arti Integrasi Bangsa

Integrasi nasional mencakup kesediaan untuk membaur dan beradaptasi dalam segala perbedaan. Hasil penelitian Ridhuan (2017) tentang *national integrity* atau pembauran bangsa mengungkap bahwa pembauran bangsa atau integrasi nasional dalam perspektif beda suku bangsa dan beda agama justru memberikan kekuatan persatuan dari dua etnis berbeda. Terjadi pembauran alami baik perkawinan secara biologis, maupun perkawinan ideologi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berikut penulis kutip hasil wawancara penelitian, mengenai pembauran bangsa (*national integrity*) dalam perspektif beda suku bangsa, beda agama dan berkembangnya isu SARA, sebagi berikut :

Dalam pengumpulan data kualitatif, peneliti dengan dibantu oleh *interviuwer*, dari mahasiswa Universitas Esa Unggul, Fakultas Hukum, Leny Herlina NPM. 20160401262 mewawancarai beberapa responden terkait dengan pengaruh sosial media dan eksistensi isu sara yang akhir-akhir ini kian berkembang ditengah-tengan

kehiduupan masyarakat. Interviuwer telah melakukan wawancara dengan beberapa pihak dan berikut ini merupakan transkrip hasil wawancara mengenai faktor-faktor pembauran kebangsaan (*national integrity*).

Pertanyaan utama:

1. Seperti yang kita lihat bahwa keadaan isu SARA di dunia maya dan media sosial begitu panas padahal pada prakteknya tidak demikian. Menurut Anda apakah yang menjadi penyebab kejadian yang demikian?
2. Bagaimana menurut Anda mengenai perkawinan antar etnis, apakah sudah membantu pembauran kebangsaan?

Jawaban/Pendapat *interviewee*:

1. Berikut merupakan jawaban/pendapat menurut Christie (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga keturunan Tionghoa dan menikah dengan etnis Pribumi dari suku Jawa:

   Menurut Christie dalam kehidupan sehari-hari dalam dunia pekerjaan, pendidikan dan bermasyarakat sudah tidak ada lagi yang namanya gesekkan-gesekkan yang berarti dalam hal perbedaan etnis. Menurutnya, asal-muasalnya adalah kesenjangan sosial. Menurut Christie, panasnya isu SARA yang marak di media sosial adalah murni karena kepentingan politik yang mengangkat isu SARA untuk mengadu domba masyarakat, namun setelah kepentingan politik ini usai, masyarakat menjadi rukun kembali.

Pertanyaan lanjutan:

2. Mengapa masyarakat Pribumi lebih menerima etnis Kaukasian, India, Arab dibandingkan dengan orang Tionghoa?

   Menurut Christie penyebabnya adalah kesenjangan ekonomi yang membawa perbedaan besar antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa, dan juga menurutnya hal ini dikarenakan etnis Kaukasian, India dan Arab adalah murni pendatang yang menetap dan berbisnis di Indonesia. Sedangkan warga Tionghoa hidup berbaur sebagai warga sejak zaman penjajahan, ikut berjuang bersama dalam memerangi penjajah dan sudah diakui menjadi bagian warga Indonesia sejak dulu, sehingga dalam hal kesenjangan sosial yang menjadi perbandingan adalah hanya antara warga Pribumi dengan warga keturunan Tionghoa.

Pendapat Christie perihal pernikahan antar etnis dan suku:

Menurut Christie ternyata dalam pernikahan antar etnis tetap ada jarak (*gap*) antara keluarga besar pihak perempuan dan laki-laki, dan menurutnya, sekalipun dalam pernikahan antara etnis Pribumi dengan etnis Pribumi juga pasti tetap ada jarak (*gap*) antara para keluarga besar masing-masing. Karena sekalipun dari etnis yang sama namun perbedaan suku juga terdapat perbedaan sifat dan kebudayaan, misalnya suku Jawa dengan suku Flores.

Tapi kerukunan dalam pernikahan semuanya tergantung dari pribadi dan sifat masing-masing pasangan dan pihak keluarga besar masing-masing pasangan. Namun cek cok (perselisihan) dalam pernikahan utamanya bukan dikarenakan perbedaan etnis, karena sekalipun pernikahan dari etnis yang sama juga sering terjadi pertikaian antar suami dan istri. Christie mengatakan bahwa ia tidak pernah membawa perbedaan etnis dalam pertengkaran. Namun memang tidak dipungkiri para orangtua/keluarga besar sebenarnya menginginkan menantu dari etnis yang sama karena alasan perbedaan cara berpikir, kebudayaan dan sifat.

3. Berikut merupakan jawaban/pendapat menurut Natalia (bukan nama sebenarnya) yang adalah warga Pribumi dan merupakan anak dari hasil pernikahan antar etnis Pribumi dari suku Jawa dan Manado:

Menurut Natalia sebenarnya sejak lahir di dalam hati manusia selalu ada toleransi, namun maraknya kasus diskriminasi terhadap etnis tertentu baik di dunia maya dan di dunia nyata sangat melunturkan sifat toleransi terhadap sesama. Dan menurut Natalia mengapa di media sosial isu SARA lebih panas adalah murni dikarenakan dengan pengetahuan yang minim mereka gaya-gayaan dan ikut-ikutan membela suku/agamanya atau membela si A atau si B tanpa menyelidiki secara betul seluruh kebenarannya. Warga dunia maya hanya berani mengungkapkan kebencian yang membabi-buta melalui media sosial padahal kenyataan yang terjadi di dunia nyata tidak ada pertengkaran antar etnis seperti yang terjadi di dunia maya., semuanya baik-baik saja seperti tidak terjadi apa-apa. Menurut Natalia apa yang terjadi di dunia maya atau meda sosial murni hanya karena gaya-gayaan dan ikut-ikutan dan dasarnya bukan karena perasaan benci.

Pendapat Natalia perihal pernikahan antar etnis dan suku:

Menurut Natalia mengenai pernikahan antar suku yang berbeda sebenarnya cukup berhasil membaurkan rasa kebangsaan, karena di dalam keluarganya yang berbeda suku, dalam hal cara berpikir dan sifat antara suku Jawa dan Manado tidak ada masalah antar etnis dan justru meningkatkan rasa toleransi yang tinggi. Namun memang tidak dapat dipungkiri pernikahan antar etnis Pribumi dan Tionghoa menurut Natalia memang lebih sulit diterima, dan menurutnya hal tersebut dikarenakan alasan sejarah yaitu memilah-milah dan membedakan pelayanan dan perlakuan dalam hukum dan bermasyarakat antara etnis Eropa, Timur asing, Tionghoa dengan Pribumi yang terbawa hingga kini, khususnya perbandingan antara etnis Tionghoa dengan Pribumi yang semakin meruncing, karena memang tujuan awal Belanda sebagai penjajah adalah ingin memecah-belah bangsa Indonesia.

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil wawancara *interviuwer* dengan *interviewee* adalah dalam perihal kehidupan bermasyarakat ternyata tidak ada gesekkan atau pertengkaran serta caci maki secara nyata mengenai perihal etnis atau suku bangsa antara orang yang satu dengan yang lainnya. Dalam dunia kerja, pendidikan, dan bermasyarakat pada kenyataannya semua hidup dengan rukun dan tidak ada bahasan yang menyinggung hal SARA apalagi sampai bertengkar karena hal tersebut. Namun memang isu SARA ini sangat sensitif sehingga kita sebagai warga yang menjunjung sikap toleransi sangat berusaha untuk tidak terlalu fokus membicarakan hal tersebut secara terbuka.

Asal-muasal isu SARA ini sebenarnya tercipta pada masa penjajahan oleh Belanda. Pembagian-pembagian terhadap etnis-etnis menjadi etnis Eropa, Timur Asing, Tionghoa dan Pribumi dan tidak adilnya pelayanan dan perlakuan oleh Penjajah Belanda saat itu memicu ketidak-senangan warga dari etnis tertentu.

Dari seluruh etnis di Indonesia yakni etnis Kaukasian, India, Arab, Tionghoa dan Pribumi, memang harus diakui yang seringkali menjadi perbandingan hanyalah antara etnis Pribumi dengan etnis Tionghoa. Hal ini disebabkan karena **nenek moyang warga keturunan Tionghoa telah berbaur sejak dahulu** dengan warga asli etnis Pribumi. Warga keturunan Tionghoa telah hidup bermasyarakat, beranakcucu dan berbahasa Indonesia.

Karena terciptanya kesenjangan ekonomi baik secara sengaja maupun tidak sengaja antara warga asli etnis Pribumi dan warga keturunan etnis Tionghoa maka tercipta pula kesenjangan sosial yang menciptakan jarak antara kedua etnis tersebut. Jarak yang tercipta ini menimbulkan rapuhnya hubungan emosional antara keduanya sehingga sedikit saja tersulut akan menimbulkan perasaan benci yang luar biasa.Hal ini pernah dan sering dijadikan senjata oleh para oknum politik untuk memecah belah bangsa demi tujuan politiknya.

Isu SARA menjadi sangat panas di dunia maya dikarenakan murni kepentingan politik, dan lemahnya iman dan pengetahuan serta mudah tersulutnya emosi warga Indonesia dengan isu-isu SARA.

Dalam hal pernikahan berbeda etnis dan suku di Indonesia sebenarnya sudah berhasil dalam mewujudkan pembauran kebangsaan, namun memang harus diakui bahwa keberhasilan pernikahan antara etnis/suku Pribumi dengan sesama etnis/suku Pribumi lebih berhasil diterima dan berbaur dibandingkan dengan pernikahan etnis Tionghoa dengan etnis/suku Pribumi. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat antara warga etnis Pribumi dengan warga keturunan etnis Tionghoa.

Interviuwer berhasil mewawancarai pasangan berbeda etnis/suku yakni pasangan Jawa-Tionghoa dan Jawa-Manado, dan dari hasil wawancara, Penulis berkesimpulan bahwa tidak ada masalah yang menyangkut etnis dalam pernikahan berbeda etnis/suku, justru pernikahan tersebut menciptakan rasa toleransi dalam kehidupan berkeluarga baik dalam hubungan pasangan tersebut maupun oleh keluarga besar kedua belah pihak. Namun memang harus diakui bahwa kedua orangtua masing-masing pasangan sebenarnya lebih setuju apabila anak mereka menikah dengan etnis/suku yang sama, dikarenakan alasan perbedaan cara pandang, cara berpikir, kebudayaan, kepercayaan dan sifat.

Dari hasil interview di atas dan digabung dengan hasil interview yang lain, setelah dilakukan analisis diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembauran kebangsaan dalam arti biologis sudah berlangsung sejak dulu. Namun ada hambatan yang berarti dalam bidang agama/keyakinan dan paham kebangsaan yang sempit (*chauvinis*). Sedangkan toleransi dan hormonisasi dalam keluarga beda etnis dan beda agama tidak menjadi faktor penghambat pembauran. Pertengkaran dalam keluarga beda etnis dan agama, dan/atau sudah

satu agama bukan disebabkan faktor asal-usul etnis, lebih diebabkan oleh faktor ekonomi.

2. Dalam persepsi pembauran ipoleksosbud pernikahan beda etnis antar pribumi, beda agama serta beda etnis pribumi dengan etnis Tionghoa meningkatkan sikap toleransi yang tinggi, tercipta hubungan harmonis serta terjadi adaptasi. Dapat bekerjasama dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan memahami serta dapat melaksanakan nilai-nilai dari Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara.
3. Isu SARA yang marak di media sosial, murni dari adanya kepentingan politik tertentu. Tujuan untuk mengadu domba masyarakat, agar timbul kebencian terhadap etnis Tionghoa. Secara historis diciptakan penjajah Belanda agar Indonesia terpecah belah.

Dengan memperhatikan hasil penelitian tersbut di atas, maka dapat diungkap faktor-faktor memperkuat integrasi nasional adalah sebagai berikut:

1. Toleransi, saling menghormati, dan tenggang rasa
2. Asimilasi, perkawinan campuran (biologis dan ipoleksosbud)
3. Komunikasi antar personal yang sejuk
4. Solideritas sosial yang tinggi
5. Dorongan pemerintahan yang terus menerus

Sebaliknya ada beberapa faktor yang dapat menciptakan disintegrasi sosial atau perpecahan bangsa, antara lain :

1. Sikap ekskusivisme, yaitu kelompok masyarakat yang menghindari pembauran
2. Chauvinisme, yaitu memiliki faham kebangsaan yang sempit, menganggap etnis lain lebih rendah.
3. Makar, kekerasan bersenjata dan terorisme.

D. Peran Tokoh Etnik Dalam Integrasi

Tokoh entik, lazim disebut tokoh masyarakat dan/atau tokoh adat sangat berperan penting dalam menajga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa atau integrasi nasional. Sebab tokoh etnik memiliki kewibawaan dan kekuatan sosial dalam berperan menentramkan dan membuat situasi menjadi kondusif. Para tokoh dapat berperan mengendalikan ketegangan sosial, mengantisipasi konflik dan

penyelesaian persengketaan. Zaman dahulu, tokoh-tokoh etnik inilah yang tampil mendamaikan setiap ada pergolakan, pertentangan (konflik), pertikaian, perbuatan kriminalitas dan menyelesaikan melalui pendekatan budaya, adat-istiadat (hokum adat), sehingga tidak semua persengketaan dan perbuatan kriminal harus diproses menurut hukum formal.

Para tokoh etnik biasanya secara informal pasti memimpin komunitas etnisnya. Mereka diangkat dan diakui sebagai peminmpin etnik karena memang memiliki kelebihan, kewibawaan dan keistimewaan oleh payuguban komunitas etnik tersebut. Paguyuban (*gemeinsscaft*) merupakan bentuk kehidupan bersama, dimana para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah, serta bersifat kekal. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah ditakdirkan berada dalam satu komunitas yang guyub. Terbentuknya paguyuban dilatari oleh 3 (tiga) factor, (1) pertalian darah berdasarkan garis keturunan (*gemeinschaft by blood*), (2) berdasarkan tempat (*gemeinschaft by place*) terdiri dari orang-orang yang berdekatan tempat tinggal, sehingga dapat saling tolong menolong, (3) guyub karena jiwa-pikiran (*gemeinscaft of mind*) teridir dari orang-orang yang walaupun tidak mempunyai hubungan darah ataupun tempat tinggal yang berdekatan tetapi mereka mempunyai pikiran dan jiwa yang sama atau satu ideologi yang sama.

Keberadaan tokoh etnik yang alami atau asli, biasanya menjabat sebagai kepala suku dan/atau kepala adat yang sangat dihormati dan dihargai oleh seluruh komunitas paguyubannya. Dulu, dan bahkan sampai sekranag (meskipun sudah sedikit agar luntur pengakuannya) para tokoh etnik : kepala suku dan/atau kepala adat berperan sangat menentukan dalam pengambilan keputusan. Termasuk dalam hal menjaga kerukunan, persatuan dan kesatuan etnis maupun wilayah dimana mereka berada.

Bila di Indonesia terdapat sebanyak 1.340 etnik (BPS 2010), maka sejumlah itu juga adanya kepala etnik yang menjadi pemimpin informal pada komunitasnya. Dalam model kepemimpinan kolektif, kepemimpinan kepala suku/etnik dapat dipersatukan kedalam suatu kepemimpinan yang lebih besar cakupannya. Misalkan dalam satu wilayah kabupaten/kota atau provinsi terdapat beberapa suku/etnik yang bermukim di wilayah tersebut, maka melalui musyawarah antara etnik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dapat mengambil kesepakatan dan menetapkan

salah seorang yang berasal dari satu etnik di lingkup wilayah itu untuk menjadi ketua adat. Sebagai pemimpin informal yang merepresentasikan seluruh suku/etnis dalam lingkup wilayah kerjanya, ketua adat dipandang sebagai figur yang dapat memberikan kontribusi bagi ketentraman, keharmonisan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.

Upaya pemerintah dalam memperkuat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin dari dikeluarkanya kebijakan tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34/2006. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pembinaan pembauran kebangsaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan masyarakat untuk terciptanya iklim yang kondusif yang memungkinkan adanya perubahan sikap, agar menerima kemajemukan masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keanggotaan forum pembauran kebangsaan adalah representasi dari masing-masing etnik dalam lingkup wilayah provinsi untuk kenaggotaan forum pada tingkat provinsi, dan kabupaten/kota untuk keanggotaan forum pada tingkat kabupaten/kota.

TUGAS-TUGAS

M5-KB : Kegiatan Kebinekaan 5 (lima)

Pernyataan dan Pertanyaan

1. Upaya pemerintah dalam memperkuat keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa juga tercermin dari dikeluarkanya kebijakan tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34/2006. Penyelenggaraan pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
   Bagaimana pandangan anda terhadap eksistensi dan urgensi pembauran kebangsaan, dengan menanalisis dari berbagai pandangan dan hasil diskusi!

2. Sebagai bangsa yang pluralis, kebinekaan suka bangsa adalah anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga perlu disyukuri agar secara psikologis memnimbulkan ikatan persaudaraan yang kuat antar suku bangsa. Namun apa bila ada satu atau beberapa permasalahan kasus terkait dengan konflik sosial horizontal antar suku bangsa, antar penganut agama satu dengan penganut agama yang lainnya, antara suku bangsa yang bermukim di satu pulau dengan suku bangsa yang bermukim di pulau yang lain, antara satu komunitas dengan komunitas lain, dan sebagainya sehingga berpotensi terjadi perpecahan, pembelahan (disintegrasi) bangsa.
   Lakukan studi atau kajian (pustaka atau lapangan), bagaimana teknik-strategi, cara-cara, upaya-upaya anda dapat menyelesaikan (andaikan terjadi) masalah konflik sosial.

PENUTUP

Kesimpulan

Integrasi nasional merupakan penyatuan suku bangsa-suku bangsa yang memiliki sifat kebagsaan yang satu, dan penyatuan wilayah-wilayah yang didiami oleh suku bangsa-suku bangsa ke dalam lingkup yang lebih besar, negara. Pembauran kebangsaan adalah proses pelaksanaan kegiatan integrasi anggota masyarakat dari berbagai ras, suku dan etnis melalui interaksi sosial dalam bidang bahasa, adat istiadat, seni budaya, pendidikan dan perekonomian untuk mewujudkan kebangsaan Indonesia tanpa harus menghilangkan identitas ras, suku dan etnis masing-masing dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian pembautan kebangsaan merupakan suatu strategi untuk memperkuat integrasi bangsa.

POSTTEST

Posttest ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman terhadap pengetahuan keanekaagaman dan kebinekaan nusantara setelah mengikuti perkuliahan dan mempelajari modul.

Harap dipilih satu jawaban yang tepat dan benar.

1. Kondisi integrasi nasional selalu mengalami pasang-surut dan dinamis mengikuti perkembangan tingkat ketangguhan ketahanan nasional Indonesia. Makin tangguh tingkat ketahanan nasional, makin kuat pula ikatan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional. Oleh sebab itu, tingkat ketahanan nasional memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kuatnya ikatan integrasi nasional. Hipotesis ini diambil dari berbagai informasi tentang implementasi ketahanan nasional yang mencakup pancagatra dan trigatra (astagatra). Akronim Pancagatra lazim disebut……..…..
   a. ipoleksosbudhankam
   b. ipoleksosbudkamsa
   c. sikayamampu
   d. ipolekbudhankam

   Jawaban A

2. Integrasi wilayah nusantara, merupakan perwujudan dari satu kesatuan pulau dalam ruang wilayah nusantara, Indonesia. Terbentang dari Sabang sampai Merauke, diapit oleh 2 (dua) benua, Benua Asia dan Benua Australia, serta berada diantara 2 (dua) samudra yaitu Samudra Pasifik dan Samudra India. Jumlah pulaunya lebih kurang 17.504 pulau. Sebagai konsekwensi logis, negara Indonesia harus mampu menjaga keutuhan wilayah nusantara. Tidak boleh satu jengkalpun wilayah nusantara diambil secara paksa oleh negara lain maupun dijual. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa bumi dan air adalah milik negara, dalam hal ini negara Indonesia. Oleh sebab itu, integrasi wilayah sangat penting untuk menjaga keutuhan NKRI dari segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan yang dapat…..
   a. membahayakan indentitas nasional
   b. membahayakan integrasi nasional

c. membahayakan intervensi internasional

d. semua benar

Kunci Jawaban B

3. Pancasila merupakan falsafah hidup bangsa Indonesia, artinya bangsa Indonesia sudah memiliki wawasan, cara pandang dan pedoman dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pancasila mempunyai sistem nilai keberadaban, kemartabatan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila juga sebagai dasar negara yang merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Dengan demikian segala sesuatu yang bertentangan dengan sumber hukum tidak boleh harus ditiadakan. Misalnya: organisasi yang bertentangan dengan Pancasila, gerakan-gerakan saparatis, makar dan anarkis bertentangan dengan Pancasila. Sehingga apapun aktivitas, sikap dan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila yang dapat berpotensi membuat perpecahan bangsa dan negara dilarang keberadaannya di NKRI. Pernyataan di atas masuk dalam kategori inegrasi…….

a. politik

b. sosial budya

c. ideologi

d. pertahanan keamanan

Kunci Jawaban C

4. Fungsi pemerintahan dalam bidang pertahanan dan keamanan mutlak diperlukan dalam menjalankan pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi pertahanan memberikan jaminan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tetap merdeka, berdulat, dan bermartabat. Sedangkan fungsi keamanan memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dan pembangunan nasional. Kedua fungsi pemerintahan ini harus bersinergi dan berintegrasi agar tercipta suasana yang aman, tenteram, kondusif, demokratis, dinamis dan harmonis. Itu sebabnya dalam konteks bela negara, fungsi pertahanan dan keamanan (TNI dan Polri) merupakan unsur utama. Tterkait dengan hak dan kewajiban warga negara, maka dalam pembelaan terhadap negara, mayarakat termasuk sebagai ……

a. unsur wajib

b. unsur pendukung

c. unsur inti
d. unsur pembela

Kunci Jawaban B

5. Integrasi nasional terdiri dari 2 (dua) kata. “Integrasi” berasal dari bahasa Inggris *integration* artinya pembauran. Pembauran dapat mewujudkan persatuan dan kesatuan yang utuh. Kata “Nasional” berasal dari bahasa Inggris *nation* artinya bangsa, rakyat, atau negara. Maka secara etimologi integrasi nasional berarti pembauran bangsa dalam persatuan dan kesatuan yang utuh. Pengertian ini sangat cocok untuk menyebut integrasi nasional Indonesia. Dimana negara Indonesia memiliki aneka ragam suku bangsa, budaya, sistem sosial, norma dan adat-istiadat.
   a. Sehingga tidak perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya
   b. Sehingga perlu ada pembauran yang menyatu dengan tidak menghilangkan ciri khas keberagamannya
   c. Sehingga perlu ada pembauran yang menyatu dengan menghilangkan ciri khas keberagamannya
   d. Semua jawaban benar

   Kunci Jawaban B

DAFTAR PUSTAKA

Administrator. (2017, Desember 3). Suku Bangsa. *Indonesia.go.id.* Diakses dari https: //indonesia.go.id/profil/suku-bangsa/kebudayaan/suku-bangsa#:~:text=Indonesia%20 memiliki%20lebih%20dari%20300,mencapai%2041%25%20dari%20total%20 populasi.

Ali, N Berlian, dkk. (2017). *Pendidikan Kebinekaan Pada Satuan Pendidikan Menengah.* Jakarta : Balitbank, Kemendikbud

Gumilar, Nugraha (2015). Ilmu Pertahanan dan Pendidikan Bela Negara Dalam Membangun Wilayah Perbatasan. *Wira Media Informasi Kementerian Pertahanan*. 54(38), 5-14

Hutapea, Erwin. (2020, Februari 22). Indonesia Punya 718 Bahasa Ibu, Jangan Sampai Punah. *Kompas.com.* Diakses dari https://edukasi.kompas.com/read/2020/02/22/ 21315601/indonesia-punya-718-bahasa-ibu-jangan-sampai-punah?page=all.

Idris, Muhammad. (2021, Januari 22). Jumlah Penduduk Indonesia Terkini Mencapai 271,34 Juta. *Kompas.com*. Diakses dari https://money.kompas.com/read/2021/01/22/090554926/ jumlah-penduduk-indonesia-terkini-mencapai-27134-juta?page=all

Kumparan.(2020, Desember 6). Isi Piagam Jakarta dan Perubahannya. *kumparan.com.* Diakses dari https://kumparan.com/berita-hari-ini/isi-piagam-jakarta-dan-perubahannya-1uhINQhU0sl/full.

Nugroho, T. Faozan. (2020, September 16). Pengertian Nasionalisme Beserta Bentuk-Bentuknya yang Perlu Diketahui. *Bola.com.* Diakses dari https://www.bola.com/ ragam/read/4356745/pengertian-nasionalisme-beserta-bentuk-bentuknya-yang-perlu-diketahui.

Prodi Tanas. (2018, Februari 28). Tentang Kami, Program Studi Ketahanan Nasional. *tannas.pasca.ugm.ac.id*. Diakses dari https://tannas.pasca.ugm.ac.id/tentang-kami/

Purwadarminta. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta : Pusat Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional

Purwanto, Antonius. (2020, Oktober 28). Sumpah Pemuda dan Kongres Pemuda Kedua. *kompaspedia. kompas.id.* . Diakses dari https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/ sumpah-pemuda-dan-kongres-pemuda-kedua.

Ridhuan,Syamsu dan Wahid, Aliaras. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta : University Press Esa Unggul.

Ridhuan, Syamsu (2018). National Integrity in the Perspsctive of Different Religious, Marriage and Sara Issues. *Jurnal Forum Ilmiah Esa Unggul*, 15(1), 10-19.

Setiawan, Ebta. (2012). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) Daring Edisi III Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). *kkbi.wb.id.* Diakses dari https://kbbi.web.id/toleran .

Shamia, Tita (2019, Januari 13). Bela Negara Tanggung Jawab Seluruh Warga Negara. *sumberprov.go.id.* Diakses dari https://sumbarprov.go.id/home/news/16111-bela-negara-tanggung-jawab-seluruh-warga-negara.html